

**PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN
GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Ivan Aryo Wibowo* dan Supriyadi**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal dalam penanggulangan gangguan kamtibmas pada pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan ideal dalam penanggulangan gangguan kamtibmas pada pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Cara memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan serta melakukan wawancara kepada para penegak hukum, praktisi kamtibmas, dan penyidik polri. Analisis data menggunakan metode kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, dalam menghadapi pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19 pada wilayah hukumnya, Polres Sleman, Polres Gunungkidul, dan Polres Bantul menghadapi beberapa problematika yaitu diantaranya, warga yang masuk dalam DPT, adanya kampanye hitam pengerusakan alat peraga kampanye, produksi berita hoax, turunnya tingkat partisipasi pemilih, konflik antara tim pemenang Rivalitas simpatisan kader. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan oleh jajaran Polres Sleman, Polres Bantul, dan Polres Gunungkidul melalui pendekatan yang bersifat persuasif. Kedua, Kebijakan yang ideal dalam penanggulangan gangguan kamtibmas pada pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan manajemen krisis dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan dengan membuat sejumlah peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malpraktik pemilu, sehingga pilkada 2020 tidak disebut sebagai pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak berintegritas.

Kata Kunci: Pilkada Serentak, Pandemi, Keamanan, Penegakan Hukum.

* Mahasiswa Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ivanaryo@mail.ugm.ac.id).

** Dosen Program S-2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (supriyadi@ugm.ac.id).

THE ROLE OF THE CRIMINAL RESERVE UNIT IN MANAGING DISORDERS OF COMMUNITY SECURITY AND ORDER ON THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL HEAD ELECTION IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC

Ivan Aryo Wibowo* and Supriyadi**

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the problems faced by the Criminal Investigation Unit in overcoming the disturbances of public order and security in the implementation of regional elections during the Covid-19 pandemic and to identify and analyze ideal policies in overcoming security and security disturbances during the regional elections during the Covid-19 pandemic

This legal research is a normative-empirical legal research that uses primary data and secondary data. How to obtain data is done through library research and conducting interviews with law enforcers, security and security practitioners, and police investigators. Data analysis used qualitative methods, while conclusions were drawn deductively.

This study has two conclusions. First, in facing the implementation of simultaneous local elections during the Covid-19 pandemic in their jurisdictions, the Sleman Police, Gunungkidul Police, and Bantul Police faced several problems, including, among others, residents who were included in the DPT, black campaigns for destroying campaign props, production of hoax news, decrease in voter participation, conflict between winning teams. Rivalry cadre sympathizers. These problems can be solved by the Sleman Police, Bantul Police, and Gunungkidul Resort Police through a persuasive approach. Second, the policy for dealing with security and social security disturbances during the simultaneous regional elections during the COVID-19 pandemic implemented by the Sleman Police, Gunungkidul Police, and Bantul Police is considered ideal and there is no need for changes in the legal political framework. The conclusion of the study is that the optimization of criminal law policies to overcome Covid-19 can be achieved if it combines several strategies such as improving legal policies, legal culture, and strict, consistent and integrated law enforcement.

Keywords: Simultaneous Pilkada, Pandemic, Security, Law Enforcement.

* Student at Master of Litigation Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (ivanaryo@mail.ugm.ac.id).

** Associate Professor at Master of Litigation, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta Yogyakarta (supriyadi@ugm.ac.id).

